TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT

Abi Hasan
STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
abihasanbatukorong@gmail.com

Abstract

One of the groups who are entitled to receive zakat is Gharim. This paper aims to analyze the method of determining the Gharim Rights in the distribution of zakat in Kampong Rimo, Kec. Mount Meriah Kab. Aceh Singkil 2) To analyze the provisions of Islamic law regarding the requirements for gharim in the distribution of zakat in Kampong Rimo, Kec. Mount Meriah Kab. Aceh Singkil. This research uses a descriptive-qualitative method with a case study approach. Data collection with two sources, namely primary data and secondary data, then the data is validated, then the validity of the data is checked using the triangulation method. The results of the study explain that the determination of Gharim as a recipient of Zakat in Kampong Rimo is determined based on the results of observations and the results of deliberation carried out by looking at the provisions of Islamic law. The Gharim are given a share of zakat to pay their debts with several conditions. The first condition, he has a need to have assets that can be used to pay his debts. The second condition is that people who have debts carry out obedience or do something religiously allowed. The third condition is that the debt must be paid at the same time or hasten to pay on time. The fourth condition, the condition of the debt is something that he can hold so that the debt is transferred to his child or from the child to his parents or debt to people who are having difficulties.

Keywords: *Gharim rights, distribution, zakat, Islamic law.*

Abstrak

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan *gharim* dalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Penetapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan kepada hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat kepada ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya dengan beberapa syarat. Syarat *pertama*, ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan membayar hutangnya. Syarat *kedua* yaitu, orang yang mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan agama. Syarat *ketiga* yaitu hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya. Syarat *keempat*, keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari anak beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.

Kata Kunci : Hak Gharim, pembagian, zakat, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan sarana penghubung terjalinnya silaturahmi (*ukhuwah Islamiyah*) antara orang yang berada (mampu) dengan orang yang tidak berada. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an terdiri dari delapan *ashnaf* (bagian) yaitu: fakir, miskin, 'amil, *gharim*, *ibnu sabil*, *jihad fi sabilillah*, orang kafir yang baru masuk Islam dan orang-orang yang memerdekakan budak.

Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (*muzakki*), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu mereka yang lemah dari segi ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat saja, pemerintah juga dapat memerintah secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya.¹

Selanjutnya, harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga 'amil dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi delapan *ashnaf* yang telah disebutkan di atas. Pembagian zakat terhadap mereka yang tergolong *ashnaf* delapan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan masa dan tempat. Salah satunya adalah pembagian zakat kepada *gharim*, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah.

Gharim yaitu orang yang tidak cukup hartanya untuk membayar hutang. Tetapi umumnya fuqaha berpendapat, apabila ia berhutang untuk kepentingan umum, maka boleh diberikan zakat kepadanya, walaupun ia sendiri orang yang kaya.² Menurut Sayyid Sabiq, *gharim* adalah orang-orang yang telah terbenam atau tenggelam dalam hutang dan tidak ada kesanggupan lagi untuk membayarnya, karena hutangnya lebih banyak dari jumlah kekayaannya.³

Dengan demikian, *gharim* adalah orang yang berhutang, baik untuk dirinya maupun untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, wajar jika ia menerima bagian dari *ashnaf* zakat sekedar untuk menutupi kebutuhannya.

Berdasarkan informasi dari beberapa orang masyarakat di Kampong Rimo terdapat warga masyarakat dengan alasan banyaknya utang diikutsertakan dalam

---

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 65.

² Bakri Hamdani, *Hukum Islam dan Kaitannya* (Bandung: Al-Ihyal Bandung, 2000.), hlm. 199.

³ *Ibid.*, hlm. 66.

penerima zakat, alasan berhutang tersebut seperti berhutang untuk keperluan pembangunan masjid atau menyantuni anak yatim piatu. Hal tersebut dilakukan dengan harapan memperoleh bagian pada saat akan diadakan pembagian zakat.

Dari pemaparan diatas maka yang menjadi pokok kajian yaitu bagaimana cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Bagaimana ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan *gharim* sebagai penerima zakat di Kampong Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kecamatan Gunung Meriah, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan *gharim* sebagai penerima zakat.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kampong Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kampong Rimo terletak lebih kurang dari 30 Km dari kota Kabupaten Aceh Singkil, Kampong Rimo mempunyai beberapa suku, etnis dan budaya dan bahasa.⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan penelitiannya adalah "Studi kasus" (Case Studies). Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Studi kasus dalam penelitian ini dipakai untuk menggali penetapan hak gharim di Kampong Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

3. Pengumpulan Data

---

⁴ Dokumen Kantor Kampong Rimo per- 09 Agustus 2020

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 65.

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang diperoleh itu ada 2 sumber yaitu: *pertama*, Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan terhadap informan yang berkaitan dengan penetapan hak gharim dalam pendistribusian zakat. Periode wawancara dan observasi pada bulan Agustus-Desember 2020. *Kedua*, Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya untuk melengkapi data utama. Sumber data merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.

4. Validitas Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu teknik menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu.⁶ Metode triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data dalam penyelidikan untuk menghasilkan pemahaman lebih dalam. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dipakai adalah *triangulasi metode*. Dengan alasan dalam triangulasi metode lebih ditekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda seperti observasi dan wawancara mendalam dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.

Demikian juga triangulasi metode ini berusaha memeriksa konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda. Metode ini menjelaskan aspek-aspek pelengkap dari fenomena yang sama, dimana seringkali poin-poinnya adalah perbedaan data ini sangat menarik bagi peneliti yang berkualifikasi dan memberikan wawasan paling banyak.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penetapan Hak Gharim Dalam Pendistribusian Zakat Di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah

---

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 88.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak JB di Kampong Rimo, beliau menyatakan bahwasanya syarat-syarat penetapan gharim dalam pembagian zakat di Kampong rimo, menurut beliau:

“Syarat dalam penetapan gharim disesuaikan kepada syari`at yang ditentukan dalam Islam yaitu yang pertama harus beragama Islam, dalam keadaan yang sangat miskin dan tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan membayar utang”⁷

Hal tersebut juga ditambahkan oleh tokoh masyarakat lain yaitu Bapak MRI, beliau juga menuturkan:

“Tentunya dalam penentuan orang-orang yang menerima zakat sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kepada data dari pemerintah kampong dan hasil musyawarah pengurus masjid, dalam hal ini tentunya juga di dasarkan kepada hasil observasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat, sama halnya dengan pentuan gharim sebagai penerima zakat, tentunya sudah berdasarkan kepada hasil kesepakatan pemerintahan kampong”⁸

Selain itu kepala Kampong Rimo menyebutkan bahwasanya:

“Data Garim yang anda maksud di kampong Rimo datanya tidak ada dicatatan khusus kami, namun selama ini memang terdapat beberapa kepala keluarga yang kami bantu karena faktor keuangan warga kami tersebut seperti adanya rumah kebakaran kami bantu, biaya rumah sakit karena penyakitnya parah sehingga membutuhkan biaya yang besar juga kami bantu, namun pada haikatnya orang yang terhempit utang akibat sesuatu hal seperti yang anda maksud ini agak sulit untuk kita deteksi, walaupun ada masalah seperti ini menurut saya yang lebih berhak untuk urusan zakat adalah badan Baitul Mal Aceh Singkil yang bertugas sebagai pemberi bantuan Zakat, sedangkan dari pemerintah Kampong hanya memberikan bantuan umum sesuai dengan peraturan yang ada, namun untuk zakat pada hari raya tetap kita berikan berdasarkan ketentuan asnaf zakat, namun selalu kita melebihkan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan dibandingkan dengan yang lain”⁹

Berdasarkan kepada hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penetapan gharim sebagai penerima zakat di kampong Rimo sebelumnya sudah ditentukan sedemikian rupa oleh pemerintah kampong Rimo berdasarkan kepada hasil observasi yang langsung dilakukan.¹⁰

Syarat-Syarat Gharim Boleh Menerima antara lain Zakat:

1. Beragama Islam

Gharim berhak menerima zakat kalau dia beragama Islam, begitu pula penerima zakat lainnya.

2. Al-Faqr (Miskin)

---

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Inisial JB pada tanggal 10 Oktober 2020

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Inisial MRI pada tanggal 10 Oktober 2020

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Kampong Bapak Manik pada tanggal 24 November 2020

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Kampong Bapak ZA, pada tanggal 28 November 2020

Syarat ini berlaku pada *gharim limaslahati nafsihi* (untuk kebutuhan pribadi), sedangkan pada *gharim li ishlahi dzatil bayyin*, syarat ini tidak berlaku. Artinya, dia boleh menerima zakat meskipun dia kaya.

3. Hutang Bukan Karena Untuk Maksiat

Jika hutang tersebut disebabkan maksiat seperti judi, minum khamr, berbuat tabdzir dan boros, maka ia tidak diberi uang zakat. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Saya tidak pernah mendapati satu pendapat ahli ilmu yang membolehkan zakat diberikan kepada orang yang terbelit hutang dalam rangka berbuat maksiat, sebelum ia bertaubat, kecuali pendapat lemah dari sebagian kecil Syafi'iyah, seperti al-Hanathi dan ar-Rafi'y, yang memandang mereka boleh diberi karena Gharim. Bagaimana Hukum Orang Yang Terbelit Hutang Ribawi? Riba merupakan dosa besar dan termasuk maksiat yang telah banyak menalan korban. Karena termasuk maksiat, maka yang terlilit hutang ribawi, ia tidak boleh diberi zakat untuk melunasinya, kecuali jika bertaubat. Akan tetapi bagi yang terpaksa berhutang dengan system riba untuk kebutuhan pokok, seperti sandang papan atau pangan, maka baitul mal boleh memberikannya zakat. Hukum darurat ini diukur sesuai kebutuhan.

4. Tidak Mampu Mencari Penghasilan Lagi

Ulama' berselisih dalam masalah ini. Sebagian Ulama syafi'iyah dan sebagian hanabilah memperbolehkan pemberian zakat pada orang yang masih mampu bekerja. Menurut penyusun kitab *Abhatsun fi Qadayaz Zakat*, hukum yang benar dalam masalah ini yaitu bila hutangnya banyak dan dia kesulitan sekali untuk melunasinya maka ia boleh menerima zakat walaupun ia masih mampu bekerja. Akan tetapi sebaliknya, jika hutangnya sedikit atau pihak pemberi hutangan memberikan tambahan waktu maka hendaknya ia tidak mengambil zakat dan berusaha untuk melunasinya (sendiri).

5. Waktu Pelunasan Sudah Jatuh Tempo

Jatuh tempo merupakan syarat yang diperselisihkan oleh para Ulama'. Ibnu Muflih rahimahullah berpendapat, "Hukum yang nampak dari hadits Qabishah Radhiyallahu 'anhu, bahwa gharim boleh mengambil zakat

walaupun belum jatuh tempo. Namun Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa gharim tidak boleh diberi zakat kecuali setelah jatuh Tempo.

Dr. Sulaiman al-Asqar menguatkan pendapat pertama dengan catatan, baitul mal boleh mengeluarkan zakat untuk gharim tersebut, apabila jatuh tempo tinggal beberapa bulan atau sudah masuk dalam tahun jatuh tempo. Jika temponya masih beberapa tahun atau lebih dari satu tahun maka tidak berhak menerima zakat untuk melunasi hutang, kecuali kondisi orang yang memberikan hutangan dalam keadaan sakit atau membutuhkan. Wallahu A'lam.

6. Gharim Bukan Termasuk Dalam Tanggungan Muzakki (Orang Yang Berzakat)

Apabila gharim berada dalam tanggungan muzakki seperti istri atau kerabat lain, maka zakat yang diberikan kepada orang-orang ini tidak sah. Karena seolah-olah dia membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dikeluarkan ini tidak bisa dinamakan zakat, namun dianggap sebagai nafkah yang diberikan oleh kepala rumah tangga untuk keluarganya. Orang-orang yang termasuk dalam tanggungan muzakki adalah istri, anak dan keturunannya dan Bapak serta kakek keatas.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Gharim diberi zakat untuk menutup hutangnya walaupun sangat banyak"¹¹ Ibnu Rusyd rahimahullah, penyusun kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan, "Gharim diberi dari zakat sejumlah hutangnya jika hutangnya bukan karena maksiat"¹²

Dalam hal ini, sering terkumpul dua sifat yaitu faqir dan gharim pada seseorang, maka boleh baginya menerima zakat untuk kemiskinannya dan melunasi hutangnya sehingga ia mendapat dua jatah. Bila diamati dengan cermat, syariat Islam yang sempurna ini ternyata merupakan solusi terbaik dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi umat, di samping niat yang utama adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin *ukhuwah Islamiyah* di antara kaum Muslimin.

---

¹¹ Al-Mugni, al-Muwaffaq, Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisy al-Jama'ily, 4/130, Cet. Ke-3 Dar Alimil Kutub KSA, Th. 1439 H /2018 M

¹² Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Muhammad bin ahmad Ibn Rusyd al Qurthuby, hlm. 221, Darul Kitab 'Aroby, cet. Pertama, Th. 1439H/ 2018M

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Persyaratan *Gharim* sebagai Penerima Zakat

Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Menurut Imam Malik dan Ahmad, orang yang mempunyai hutang dibagi kepada dua golongan dan masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Aliran Syafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: *pertama*, hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa; *kedua*, hutang untuk kepentingan pribadi; ketiga, hutang karena menjamin orang lain.

Untuk dua yang terakhir, dana zakat diberikan kepada yang berhutang kalau dia tidak mampu membayarnya. Hutang yang disebabkan oleh upaya mendamaikan dua orang yang bersengketa, meskipun yang berhutang secara pribadi kaya, ia berhak mendapatkan bantuan dana zakat untuk mengganti dana yang dikeluarkannya. Begitu juga hutang yang diakibatkan karena program atau kegiatan untuk kepentingan sosial, seperti dana yayasan anak yatim atau rumah sakit untuk pengobatan masyarakat miskin atau sekolah untuk kaum muslimin.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, *gharim* terbagi kepada dua golongan. Golongan *pertama* adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk keperluan nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusakkannya karena kesalahan, lupa atau yang seperti itu. Jadi *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dengan tidak berlebihan. Oleh karena itu, imam berkewajiban membayar dari baitul mal.¹³

Golongan *kedua* yaitu orang yang mengalami bencana hidup dan mengalami berbagai macam musibah di dalam hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang menkamponk untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Orang yang

---

¹³ Imam an-Nawawi, Juz VI, hlm. 123.

mengalami bencana dan musibah yaitu seperti orang yang hartanya terbawa banjir, musnah terbakar dan orang yang mempunyai banyak anggota keluarga namun tidak mempunyai harta, hingga harus meminjam untuk menafkahi keluarganya itu.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bila hutang tersebut dilakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Namun, jika hutang itu dilakukan untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, walaupun ia dalam kondisi mampu/kaya.¹⁴

Meskipun *gharim* merupakan salah satu golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat, tetapi terdapat persyaratan tersendiri bagi penerimanya. Golongan ini diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya dengan beberapa syarat. Syarat *pertama*, ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan membayar hutangnya. Apabila ia kaya dan mampu menutupi hutangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian zakat.¹⁵

Jika ia memiliki harta yang dapat digunakan membayar hutangnya, maka ia diberi bagian dari zakat sekedar untuk membayar sisa hutang saja. Bila ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutang, tetapi ia akan mampu untuk membayarnya dengan cara bekerja dan berusaha, maka ia berhak diberi bagian pula karena ia tidak mungkin mampu membayar kecuali dalam waktu yang lama. Sedangkan terkadang datang padanya sesuatu halangan yang menyebabkannya tidak dapat membayar hutang.

Kondisi tersebut berbeda dengan keadaan golongan fakir sebab kadang kala ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berusaha pada waktu itu. Adapun mensyaratkan adanya kebutuhan orang yang mempunyai hutang terhadap sesuatu untuk membayar hutangnya, bukan berarti bahwa ia harus tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa, rumah, pakaian, hamparan dan perabot rumah tangga tidak dianggap memiliki sesuatu nilai untuk membayar hutangnya. Demikian pula pelayan dan kendaraan yang dimiliki, jika keadaan

---

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 286.

¹⁵ As-Said Bakri Muhammad Syata,, Juz II, hlm. 191.

membutuhkan keduanya. Bahkan bila ia memiliki semuanya itu, ia tetap berhak mendapatkan bagian zakat untuk membayar hutangnya.¹⁶

Apabila seseorang yang mempunyai hutang mempunyai harta, lalu hutangnya dibayar dengan hartanya, maka akan berkurang hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, harta yang memenuhi kebutuhan hidupnya tetap dibiarkan atau tidak diusik dan dia diberi bagian dari zakat untuk membayar sisa hutangnya.

Syarat *kedua* yaitu, orang yang mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan agama. Sedangkan jika ia mempunyai hutang karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka ia tidak berhak memperoleh bagian dari zakat. Selanjutnya yang sejenis dengan itu, maksudnya adalah orang yang berlebih-lebihan dalam memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya, meskipun untuk menikmati sesuatu yang diperbolehkan.¹⁷

Syarat *ketiga* yaitu hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu atau penangguhan, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena termasuk *gharim*, sehingga tercakup dalam keumuman nash. Sedangkan menurut pendapat yang lain, ia tidak boleh diberi karena tidak membutuhkan membayar hutang pada waktu sekarang. Menurut pendapat yang lain lagi, jika tempo waktunya habis tahun itu juga, maka ia berhak diberi dan apabila tidak, maka jangan diberi dari zakat tahun itu.

Syarat *keempat*, keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari anak beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.

D. Kesimpulan

1. Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo sudah ditentukan berdasarkan kepada hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat kepada ketentuan syariat Islam.

---

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002). hlm. 596.

¹⁷ As-Said Bakri Muhammad Syata., Juz II, hlm. 192.

2. *Gharim* merupakan salah satu golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat, tetapi terdapat persyaratan tersendiri bagi penerimanya. Golongan ini diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya dengan beberapa syarat. Syarat *pertama*, ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan membayar hutangnya. Syarat *kedua* yaitu, orang yang mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan agama. Syarat *ketiga* yaitu hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya. Syarat *keempat*, keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari anak beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisy al-Jama'ily, *Al-Mugni, al-Muwaffaq*, Dar Alimil Kutub KSA, Th. 1439 H /2018 M
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Hamdani, Bakri. *Hukum Islam dan Kaitannya*, Bandung: Al-Ihyal Bandung, 2000.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhammad bin ahmad Ibn Rusyd al Qurthuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Darul Kitab 'Aroby1439H/ 2018M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002.